



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD TAUFIQ RATULE
2. Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
3. NHK : 143273

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.337.352.653

1. Tanah Seluas 161 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 75.343.154
2. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 82.228.997
3. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/36 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 233.984.952
4. Tanah Seluas 2093 m2 di KAB / KOTA KONAWA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 76.479.653
5. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 708.639.647
6. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 11.576.250
7. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 33.337.500
8. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 38.587.500
9. Tanah Seluas 200000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 77.175.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 110.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



2. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR B65 - R Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	87.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.763.257.742
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.298.110.395
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.298.110.395

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.